

**RINGKASAN**

Hukum yang pada tahapan mula dipakai sebagai pengawal dalam perjanjian angkutan udara, dalam hal ini khususnya angkutan barang yang mengambil bentuk exoneratie clause sebagai tertera dibalik SMU, ternyata melindap secara mencengangkan bila dikemudian hari terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi sesuatu pihak sekontrak. Dalam pengamatan hal ini terjadi karena peraturan yang ditunjuk oleh exoneratie clause, sudah tidak memenuhi tuntutan perkembangan dewasa ini. Lagi pula prosedur pengiriman barang untuk sampai diperut pesawat harus melewati beberapa mata rantai, dimana pada tiap mata rantai yang dilalui selalu disodorkan persyaratan-persyaratan tertentu yang nampak kurang wajar. Dari rangkaian kejadian seperti ini exoneratie clause dalam perjanjian angkutan barang lewat udara, sering tidak lagi didaya gunakan karena dirasa tidak pernah mampu mendatangkan kepuasan yang memadai. Setiap ada peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kerugian, misal barang kiriman hilang atau rusak, penyelesaian secara rekonsiliasi lebih disukai dari pada menuntut ganti rugi melalui salurah hukum.

**J U D U L : EXONERATIE CLAUSULE PADA PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA.**

**A U T O R : Moch. Isnaeni, S.H.**

**FAKULTAS : Hukum Universitas Airlangga.**